

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI ACEH TAHUN 2010-2012**

Junarwati

Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Hasan Basri, Syukriy Abdullah

Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of Local Revenue and its components which include Local Taxes, Local Retribution, Zakat, Results of Local Investment, and Others Local Income on the local governments financial performance in Aceh. The population was districts/cities in Aceh Province and the unit of analysis of this study was the local government budget report (or financial statements) audited by Supreme Audit Agency (BPK). A total of 23 Local Government Financial Reports districts/cities in Aceh province with the observation period of 3 years, or 69 local government financial reports, where analyzed using the multiple linear regression model. The first finding indicates that Local Revenue affects the financial performance of the districts/cities in Aceh province. Furthermore, other results suggests that the components of the Local Revenue: Local Taxes, Local Retribution, Zakat, Results of Local Investment, and Others Local Income jointly have effect on the local financial performance of the district/city in Aceh province.

Keywords : Local Financial Performance, Local Revenue

1. PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan secara mandiri, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri (Nasution, 2010). UU No.32/2004 pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan kewenangannya, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menggali sumber penerimaan berupa pendapatan sendiri yang berasal dari potensi yang ada di daerah. UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah telah mengatur dan menetapkan jenis pajak dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

Penerimaan daerah berupa PAD harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan (Pasal 4 PP No.105/2000). Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah sebelumnya diaudit oleh *external auditor*, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Informasi yang terkandung dalam laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah (Abdullah, 2013; Mahmudi, 2007). Salah satu ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat penyerapan anggaran, yakni pencapaian realisasi belanja daerah yang dibandingkan dengan anggarannya. Indikator ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sekaligus menggambarkan keakuratan estimasi dalam perencanaan anggaran.

Di sisi lain, berdasarkan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Aceh untuk tahun anggaran 2012, dari 23 kabupaten/kota, hanya 7 LKPD yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan kondisi pengelolaan keuangan yang belum baik. Kepala Divisi Kajian Advokasi Kebijakan Publik Gerakan Anti Korupsi (Gerak), Isra Safiril, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh menilai bahwa kinerja keuangan daerah di Aceh masih buruk. Hal ini dipandang sebagai cerminan lemahnya pengelolaan keuangan daerah, yang menunjukkan besarnya potensi terjadinya penyimpangan anggaran.

Pencapaian realisasi atas anggaran belanja daerah dipengaruhi oleh realisasi penerimaan daerah, terutama yang berasal dari pendapatan daerah. Kesesuaian waktu (*timing*) dan efektifitas mekanisme penerimaan dan pengeluaran akan berpengaruh terhadap tingkat realisasi belanja, khususnya untuk pendapatan yang dapat dibelanjakan pada tahun anggaran yang sama (*matching*). Oleh karena PAD merupakan sumber penerimaan yang dapat dikontrol oleh pemerintah daerah, maka realisasi belanja akan dipengaruhi oleh realisasi PAD (Abdullah, 2013).

Penelitian ini menguji pengaruh PAD dan komponen-komponennya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan data yang bersumber dari laporan pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan dari komponen-komponen PAD tersebut, yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil investasi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

2. KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN HIPOTESIS

Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Pasal 1 PP No.58/2005). Hal yang sama dinyatakan oleh Halim (2007:23) dengan penambahan adanya kepemilikan yang jelas secara peraturan. Keuangan daerah dikelola melalui anggaran daerah, yakni rencana keuangan yang disusun

berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah.

Anggaran daerah di Indonesia disebut APBD, yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu tahun anggaran. Anggaran daerah menjadi ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah ketika di dalam laporan realisasi anggaran (LRA) diperbandingkan antara anggaran dan realisasi ketiga komponen tersebut. Menurut Sucipto (2007), kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundangan selama satu periode anggaran.

(Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa Perhitungan APBD. Analisis rasio keuangan tersebut dapat digunakan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, dan mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah (Halim, 2007:232).

Menurut Arifin (2004) ada beberapa analisis rasio keuangan di dalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD, yakni tingkat kemandirian pembiayaan, tingkat ketergantungan, dan desentralisasi fiskal.

Dalam penelitian ini, rasio keuangan yang digunakan adalah tingkat kemandirian pembiayaan berdasarkan kriteria kemampuan pembiayaan. Belanja langsung non pegawai adalah belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Sucipto, 2007:36).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (Pasal 1 Angka 15 UU No. 17/2003). Berdasarkan Pasal 1 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, PAD adalah sesuatu yang diperoleh Pemerintah Daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Hipotesis Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan dan tujuan penelitian mengenai kinerja keuangan daerah, maka hipotesis yang diajukan adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Aceh.
2. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Zakat, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh secara bersama-sama dan sendiri-sendiri terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Aceh.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sensus. Dimana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2010-2012, terdapat 23 pemerintahan daerah yang terdiri dari 18 pemerintahan kabupaten dan 5 pemerintahan kota. Selanjutnya dari 23 kabupaten/kota akan diamati selama 3 periode sehingga jumlah pengamatan sebanyak 69 pengamatan.

Operasionalisasi Variabel

1. *Kinerja Keuangan Daerah*

Menurut Sucipto (2007), kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

2. *Pendapatan Asli Daerah*

Berdasarkan UU No. 32/2004, PAD adalah sesuatu yang diperoleh Pemerintah Daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. *Pajak Daerah*

Menurut Kesit (2003:2) pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah

4. *Retribusi Daerah*

Koswara (2001:191) menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung seseorang atau badan atau jasa layanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah.

5. *Zakat*

Pergub NAD No. 60/2008 menyebutkan bahwa zakat bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya di bawah pengelolaan Baitul Mal.

6. *Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan*

Sesuai UU No. 33/2004, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

7. *Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah*

Berdasarkan UU No. 33/2004 rekening disediakan untuk menganggarkan penerimaan

daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Metode Analisis

Data Penelitian dianalisis dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda yaitu menggunakan pooled data mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Data diolah dengan menggunakan program bantuan SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*).

Pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda. Adapun persamaan model regresi linear berganda dalam penelitian ini diformulasikan menjadi 2 model regresi yaitu model regresi linear berganda pertama, yakni memprediksi pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan daerah. Model regresi linear berganda kedua, yakni memprediksi pengaruh komponen-komponen PAD terhadap kinerja keuangan daerah.

Rancangan Pengujian hipotesis

Untuk melihat pengaruh variabel independen (PAD dan komponennya) terhadap variabel dependen (kinerja keuangan daerah) dilakukan dengan dua cara yaitu: uji secara bersama-sama dan uji secara sendiri-sendiri.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan regresi linear berganda atas pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Regresi Linear Berganda Pengujian Hipotesis Pertama

Persamaan Regresi $Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 X_{it} + \varepsilon$	
KK	= 3,572 + 6,525 PAD
Sig	= 0,000
F – value	= 167,475
R/R ²	= 0,845/0,714

Berdasarkan tabel 4.1, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_{it} = 3,572 + 6,525 X_{it} + \varepsilon$$

Hasil pengujian hipotesis pertama dapat dilihat langsung dari nilai koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian pertama menunjukkan nilai koefisien regresi (β_1) adalah 6,525 untuk variabel PAD. Penentuan hipotesis menyebutkan jika $\beta_1 \neq 0$ maka H_a diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja

keuangan daerah. Hasil ini mendukung hipotesis pertama (Ha1) yang telah dirumuskan yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2010-2012.

Pengujian hipotesis kedua tentang pengaruh komponen Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Zakat, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap kinerja keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tab el 2. Hasil Regresi Linear Berganda Pengujian Hipotesis Kedua

Persamaan Regresi $Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} \epsilon$					
KK = 3,002 + 8,084 PD + 8,649 RD + 4,582 Z + 12,641 HPKDYD + 2,959 LLPADYS					
Sig =	0,000	0,000	0,141	0,030	0,034
F - value =	20,247				
R/R² =	0,785/0,616				

Berdasarkan tabel 4.2, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_{it} = 3,002 + 8,084 X_{1it} + 8,649 X_{2it} + 4,582 X_{3it} + 12,641 X_{4it} + 2,959 X_{5it} \epsilon$$

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai koefisien regresi (β) masing-masing variabel adalah 8,084 untuk variabel Pajak Daerah (β_1), 8,649 untuk variabel Retribusi Daerah (β_2), 4,582 untuk variabel Zakat (β_3), 12,641 untuk variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (β_4), dan 2,959 untuk variabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (β_5).

Penentuan hipotesis untuk pengujian secara bersama menyebutkan jika paling sedikit ada satu koefisien regresi (β_i) dari variabel bebas ($i=1,2,3,4,5$) $\neq 0$, maka secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Artinya, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Zakat, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan daerah. Selanjutnya hasil pengujian secara sendiri-sendiri dalam penelitian ini ditentukan dengan melihat langsung nilai signifikansi dari koefisien regresi (β) masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Berdasarkan nilai yang sama dari pengujian secara bersama sebelumnya, maka penentuan hipotesis secara sendiri-sendiri menyebutkan jika $\beta_i \neq 0$ maka H_a diterima, artinya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Zakat, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh secara sendiri-sendiri terhadap kinerja keuangan daerah.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sebesar 71,4%. Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini diukur dengan kemampuan PAD membiayai belanja langsung non-pegawai. Hasil tersebut menunjukkan bahwa baik atau buruknya kinerja keuangan suatu daerah dapat ditentukan dari pendapatan yang diterima daerah tersebut.

Sebagai contoh, PAD yang diterima kota Subulussalam pada tahun 2010 sebesar Rp.3.361.400.822,81 merupakan PAD yang paling rendah dari 23 kabupaten/kota lainnya selama periode 2010-2012. Hal tersebut mengakibatkan kinerja keuangan daerah Kota

Subulussalam juga mengalami tingkat yang paling rendah yaitu 6,04% dari 23 kabupaten/kota lainnya selama periode 2010-2012.

Sedangkan PAD yang paling tinggi diterima oleh kota Banda Aceh pada tahun 2012 yakni sebesar Rp.99.022.803.954,00, sehingga kinerja keuangan kota Banda Aceh sebesar 76,56%. Hasil ini membuktikan bahwa semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah maka dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah tersebut.

Selanjutnya komponen PAD yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Zakat, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah juga berpengaruh baik secara bersama maupun sendiri-sendiri terhadap kinerja keuangan daerah. Pengaruh yang dihasilkan oleh komponen PAD terhadap kinerja keuangan daerah sebesar 61,6%. Peningkatan penerimaan dari komponen PAD terbukti dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan, semakin banyak komponen PAD yang diterima yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Zakat, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah maka akan meningkatkan kinerja keuangan daerah tersebut.

Telah diketahui bahwa PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah yang berimplikasi pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga sudah seharusnya pemerintah daerah harus meningkatkan PAD daerahnya masing-masing guna peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2010-2012.
2. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Zakat, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh secara bersama-sama dan sendiri-sendiri terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2010-2012.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis bagi penelitian selanjutnya adalah:

1. Untuk penelitian selanjutnya:
 - a. Menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah seperti, variabel Dana Alokasi Khusus maupun Dana Alokasi Umum.
 - b. Menggunakan model analisis penelitian yang berbeda dengan penelitian ini seperti analisis jalur (path analysis). Karena model ini dapat menganalisis hubungan antar variabel untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung dari komponen-komponen PAD terhadap kinerja keuangan daerah.
 - c. Kurangnya perincian data keuangan pada beberapa LKPD dapat dijadikan pembandingan data penelitian selanjutnya agar tidak melihat LRA saja, namun juga Catatan Atas Laporan Keuangan dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
2. Bagi kabupaten/kota di Provinsi Aceh:
 - a. Dalam hal peningkatan PAD, Pemda harus lebih giat menggali lebih banyak sumber-sumber

- pendapatan yang potensial bagi daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.
- b. Pemda harus tegas pada masyarakat yang tidak taat bayar pajak, hal ini dimaksudkan agar dirasakannya keadilan bagi masyarakat.
 - c. Pemda harus memperbaiki dan memberikan fasilitas lebih baik kepada BUMD yang telah didirikan agar laba yang dihasilkan dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*.
Blog: <http://syukriy.wordpress.com>.
- Nasution, Nina Andriany. 2010. *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sucipto. 2007. Penilaian Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi Universitas Sumatera Utara*. Medan. Artikel online melalui <http://library.usu.ac.id/download/fe/akuntansi-sucipto.pdf>. diakses pada 06/09/2013.
- Undang-Undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Arifin, Johar. 2004. *Analisis Laporan Keuangan Berbasis Komputer*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat